

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelanggaran HAM berat sebagaimana tertuang dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 7, yang meliputi ; kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, memang memerlukan perhatian yang extra dalam penyelesaiannya. Karena itu adalah persoalan yang serius dan “*extraordinary*”, maka juga perlu penyelesaian yang *extraordinary*.

Tesis yang berjudul “Alternatif Penyelesaian Hukum Extra Judicial Killings 1965 melalui Mekanisme Yudisial dan Non Yudisial”, ini mencoba memberikan alternatif model penyelesaian, baik melalui mekanis yudisial seperti : Pengadilan HAM Ad Hoc (UU No. 26 Tahun 2000) maupun melalui Pengadilan Hybrid (Campuran), dan melalui mekanisme non-yudisial, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Komisi Islah dan Rehabilitasi.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa penyelesaian HAM berat masa lalu yang dikenal dengan *extrajudicial killings 1965*, harus menjadi tanggungjawab negara (*state responsibility*), karena kewajiban negara untuk melindungi

warga negaranya sebagaimana amanat UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Bahwa sulitnya melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat, tidak terlepas dari silang sengkabut persoalan politik masa lalu. Sehingga hal itu tercermin dalam politik hukum pembentukan UU No. 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan HAM, Pasal 43, Ayat (2) yaitu : Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Ini merupakan bentuk “*design to fail*” artinya bahwa UU No. 26 tahun 2000, didesain untuk gagal, sehingga tidak terjadi pengadilan HAM ad hoc.
3. Bahwa UU No. 26 tahun 2000 yang merupakan adopsi dari Statuta Roma 1998, tidak sepenuhnya mengadopsi secara penuh. Hilangnya *the elements of crimes*, akan menyulitkan pengadilan dan menimbulkan tafsir yang berbeda-beda sehingga ini akan memunculkan spekulasi “imunitas” bagi pelaku. Disamping itu, ada beberapa perbedaan dalam menterjemahkan kalimat dari statuta roma kedalam bahasa indonesia menimbulkan arti yang berbeda sehingga penanggungjawab terhadap pelanggaran HAM berat dapat lolos dari hukuman.

4. Bahwa pengadilan hybrid sebetulnya merupakan alternatif yang bagus dalam menghindari intervensi politik negara. Tetapi pengadilan hybrid tidak serta merta mudah dilaksanakan, mengingat beberapa kasus dilaksanakannya pengadilan hybrid (campuran), terjadi dalam kondisi adanya pihak asing yang sudah berada dalam negara yang bersangkutan, seperti Timor Timur. Disamping itu, pengadilan hybrid hanya dapat dilaksanakan jika ada permintaan negara yang bersangkutan, dalam hal Indonesia adalah presiden Joko Widodo, yang meminta PBB untuk melaksanakan pengadilan Hybrid. Disamping itu Pengadilan Hybrid, juga belum jelas konstruksinya seperti apa, sehingga dalam kasus Timor Timur, pengadilan Hybrid kurang maksimal.
5. Bahwa alternatif penyelesaian lain adalah melalui mekanisme non-yudisial seperti KKR. Ini merupakan model *restorative justice*. Tetapi sejak dibatalkannya UU No. 27 tahun 2004, maka tidak ada lagi aturan hukum yang mengatur pelaksanaan KKR. Memang UU No. 26 tahun 2000, Pasal 47, Ayat (1), mengatur penyelesaian melalui KKR, tetapi pada ayat (2) sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Undang-Undang. Harapannya adalah pada RUU KKR, tetapi RUU KKR tak kunjung disahkan dan memiliki banyak kelemahan.

6. Alternatif lain menurut penulis adalah melalui mekanisme “Islah dan rehabilitasi”, dimana kita pernah memiliki pengalaman terhadap mekanisme islah yaitu pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 dan Talangssi 1989 disamping itu ditingkat lokal ada Peraturan Walikota Palu Nomor 25 tahun 2013, tentang Rencana Aksi nasional HAM Daerah.

B. Saran

1. Perlunya negara mengambil tanggungjawab terhadap pelanggaran HAM masa lalu, dan presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan dengan segala kewenangannya harus berani mengambil langkah tegas membuat Keputusan Presiden (Keppres) Penyelesaian HAM 1965.
2. Perlunya revisi terhadap UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Pasal 43 Ayat (2), dimana mengurangi peran DPR RI yang cenderung dapat menggagalkan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, untuk kasus-kasus lain yang belum terselesaikan.
3. Perlunya revisi UU No. 26 tahun yang disesuaikan dengan aslinya yaitu: Statuta Roma 1998, seperti memasukkan *the elements of crimes*, serta menerjemahkan ulang beberapa kalimat yang dapat mengarah pada terjadinya “imunitas” bagi para pelaku.

4. Perlunya untuk melakukan penyempurnaan RUU KKR ke arah yang lebih baik, atau jika dengan menunggu RUU terlalu lama, maka presiden perlu mengeluarkan Keppres tentang KKR atau Komisi Islah dan Rehabilitasi, jika memang ada pelanggaran HAM masa lalu yang harus diselesaikan melalui mekanisme KKR.
5. Perlu alternatif penyelesaian dengan meminjam hukum islam yaitu Islah dan Rehabilitasi sebagai upaya menghindari politisasi dan stigma lainnya, seperti pandangan Karin Aggestam, "*The Old Wine, In the new bottle*", atau membungkus dengan kemasan baru dengan isi yang lama. Belajar dari islah kasus Tanjung Priok, Talangsari dan Palu Sulawesi Tengah.